

Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa

Prof. Dr. Indra Bastian, M.B.A.
Hendrian, S.E., M.Si.



PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan kecamatan dan desa akan menentukan pencapaian program kecamatan dan desa melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keluaran/hasil dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perencanaan kualitas *output* dan *outcome* kecamatan dan desa.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami dan mengerti perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu memahami:

1. teori perencanaan pembangunan kecamatan dan desa;
2. sistem perencanaan pembangunan kecamatan dan desa;
3. siklus perencanaan pembangunan kecamatan dan desa;
4. teknik perencanaan pembangunan kecamatan dan desa;
5. contoh perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pemantapan Konsep

732 Desa di Sultra Masih Tertinggal

Posted by [moline](#) on Friday, [25 February 2011](#) at 18:49.

KOMPAS.com- Sebanyak 732 desa (51,6 persen) di Sulawesi Tenggara masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Desa-desa itu tersebar di 9 kecamatan. Umumnya, desa-desa tersebut berada di kepulauan atau pedalaman, sehingga tak terjangkau infrastruktur.

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sultra tahun 2010, dari 732 desa tertinggal tersebut, 82 desa di antaranya masuk kategori sangat tertinggal. Hanya tiga daerah di Sultra yang tak masuk kategori tertinggal, yakni Kota Kendari, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Kolaka.

Indikator ketertinggalan memakai 14 parameter dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Di antara parameter itu adalah ketersediaan jaringan listrik, jalan, air bersih, fasilitas kesehatan, komunikasi, dan mata pencaharian. Kondisi desa tertinggal atau sangat tertinggal di Sultra didominasi ketiadaan jalan yang layak, listrik, maupun air bersih.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sultra Muhamad Faizal mengatakan, ketertinggalan desa-desa di Sultra disebabkan wilayah seluas 3,8 juta hektar atau 119 persen dari luas Jawa Tengah, hanya diisi penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa (6,8 persen populasi Jateng).

"Penduduk yang sedikit itu tersebar di wilayah-wilayah kepulauan hingga pelosok-pelosok daratan," kata Faizal saat ditemui di Kendari, Jumat (25/2/2011). Persebaran penduduk dalam wilayah yang luas itu menimbulkan masalah pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.

Adapun anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. Faizal mengatakan, APBD Provinsi Sultra pada tahun 2011 hanya Rp 1,2 triliun, sementara total gabungan APBD seluruh 12 kabupaten/kota di Sultra hanya sekitar Rp 7 triliun.

<http://apakabarsidimpuan.com/2011/02/732-desa-di-sultra-masih-tertinggal>



LATIHAN _____

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jawab dan tuliskan pada Kertas Kerja yang telah tersedia untuk pertanyaan di bawah ini.

- 1) Jelaskan mengenai perencanaan pembangunan kecamatan dan desa sesuai dengan pemahaman Saudara!
- 2) Jelaskan perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa!
- 3) Menurut artikel di atas, bagaimana desa-desa tersebut dapat dikatakan tertinggal? Jelaskan!



KERTAS KERJA LATIHAN 1 _____

- 1) Perencanaan pembangunan kecamatan dan desa:

Apa itu perencanaan?

Apa yang dimaksud dengan “indikator pembangunan”?

Bagaimana rencana disusun dalam setiap organisasi kecamatan dan desa?

- 2) Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Berilah tanda \checkmark untuk jawaban yang benar:

Cek (\checkmark)	Pernyataan
	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

3) Desa-desanya dikatakan tertinggal:

Apa dasar yang digunakan untuk mengukur ketertinggalan desa di Sultra?

Berikut adalah parameter yang menunjukkan bahwa desa-desanya tersebut tertinggal:

Berilah tanda \checkmark untuk jawaban yang benar!

ketersediaan jaringan listrik

ketersediaan jalan

ketersediaan air bersih

ketersediaan fasilitas kesehatan

kondisi komunikasi

kondisi mata pencaharian

Dari parameter tersebut, mana saja yang mendominasi?

.....
.....
.....

Analisislah artikel tersebut! Mengapa desa-desa di Sultra tersebut tidak terjangkau infrastruktur?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Perencanaan pembangunan kecamatan dan desa:

Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal ini perencanaan pembangunan kecamatan dan desa adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Menurut beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data, atau disebut juga dengan “indikator pembangunan” adalah untuk menyediakan target perencanaan. Sebagai contoh, dalam organisasi pemerintahan, indikator pendapatan per kapita yang ingin dicapai oleh suatu daerah sering dijadikan tujuan yang dibidik dengan kemajuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu, target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah.

Dalam setiap organisasi kecamatan dan desa, rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasi yang ada. Pada setiap jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya.

2) Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan mengenai Perencanaan Pembangunan Desa pada Bab VI pasal 63-65, yang mencantumkan bahwa:

✓	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
✓	Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
✓	Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
✓	Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka meliputi RPJMD dan RKP Desa
✓	RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
✓	Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. keuangan desa;
- d. profil desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

3) Desa-desanya dikatakan tertinggal:

Dasar yang digunakan untuk mengukur ketertinggalan desa di Sultra: Menggunakan indikator ketertinggalan dengan 14 parameter dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Berikut adalah parameter yang menunjukkan bahwa desa-desanya tersebut tertinggal:

Berilah tanda \checkmark untuk jawaban yang benar!

- \checkmark ketersediaan jaringan listrik
- \checkmark ketersediaan jalan
- \checkmark ketersediaan air bersih
- \checkmark ketersediaan fasilitas kesehatan
- \checkmark kondisi komunikasi
- \checkmark kondisi mata pencaharian

Parameter yang mendominasi:

- a. ketiadaan jalan yang layak
- b. ketiadaan listrik
- c. ketiadaan air bersih

Desa-desanya di Sultra tersebut tidak terjangkau infrastruktur:

Umumnya, desa-desanya tersebut berada di kepulauan atau pedalaman, sehingga tak terjangkau infrastruktur. Ketertinggalan desa-desanya di Sultra disebabkan wilayah seluas 3,8 juta hektar atau 119 persen dari luas Jawa Tengah, hanya diisi penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa (6,8 persen populasi Jateng). Persebaran penduduk dalam wilayah yang luas itu menimbulkan masalah pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Anggaran pemerintah daerah sangat terbatas.

KEGIATAN BELAJAR 2

Studi Kasus

Kecamatan dan Desa Akan Nikmati Pembangunan

Sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan, Pemkab Malinau telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2011- 2016 yang memiliki *time frame* lima tahun. Dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Malinau tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Selain mengacu kepada RPJPD, penyusunan RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kaltim 2008-2013 dan RPJM nasional tahun 2009-2014. Hal ini agar tercipta keselarasan pembangunan antara kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karenanya, kata Bupati Dr. Yansen TP M.Si., untuk menciptakan akselerasi pembangunan, Pemkab Malinau telah mengidentifikasi empat isu utama dalam kerangka pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari semua *stakeholder* di daerah, termasuk para pemangku kepentingan dan komponen masyarakat. Empat isu utama yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penata layanan pemerintahan yang baik dan benar atau reformasi birokrasi. Untuk merespons isu-isu utama daerah sebagaimana yang saya sebutkan di atas, Pemkab Malinau tengah menyiapkan program strategis pada empat bidang itu.

Bidang infrastruktur, berupa pembangunan jalan, jembatan, pembangunan infrastruktur pedesaan dan kecamatan serta tata ruang pedesaan dan kecamatan. Ini sebagai pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Malinau, membuka isolasi daerah untuk memudahkan akses transportasi, komunikasi dan informasi serta menata ruang pedesaan dan kecamatan agar lebih baik, rapi, indah dan tertib.

“Tidak ada lagi kecamatan yang tidak diperhatikan, semua kecamatan akan menikmati pembangunan yang adil dan seimbang dan akan ditata pembangunannya secara terpadu, sampai ke desa-desa sebagaimana prinsip pembangunan Malinau yaitu, membangun Malinau dari desa” tegasnya.

Di bidang SDM, pemkab bertekad untuk melakukan upaya yang menyeluruh dan konsisten terhadap maksud serta tujuan dari pada pembangunan yang akan dilakukan. Yakni tidak semata pembentukan kemampuan SDM birokrasi (*capability bureaucracy resource*). Tetapi juga terbentuknya SDM masyarakat dan swasta sebagai bagian dari pilar pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu langkah strategis pemkab adalah merevitalisasikan resolusi sumber daya pembangunan yang dimiliki, baik SDM maupun SDA

yang tersedia cukup besar di bumi intimum ini. Salah satu langkah strategis yang efisien dan efektif untuk memfokuskan segala daya yang di miliki adalah peningkatan kualitas sektor kesehatan berupa perlengkapan, SDM, pelayanan dan manajemen RSUD Malinau.

Sehingga RSUD tidak hanya mampu melayani kebutuhan masyarakat Malinau semata. Tetapi juga akan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat dari daerah sekitar Kabupaten Malinau. Pilihan strategis ini adalah karena Malinau memiliki sumber dukungan yang sangat memadai yaitu fasilitas gedung yang sangat representatif, SDM yang bisa dibentuk. Dukungan dana yang dapat di-*manage*, letak strategis Malinau di antara tiga kabupaten yaitu Bulungan, Tanah Tidung dan Nunukan bahkan dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur pada saatnya nanti.

Demikian juga posisi dukungan faktor alam yang dinamis untuk menunjang sektor kesehatan dari aspek konservasi yaitu alam yang *virgin* dan produk yang higienis yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam arti luas.

Sumber: http://www.malinau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:kecamatan-dan-desa-akan-nikmati-pembangunan&catid=1:latest-news&Itemid=119

diakses tanggal 26 Desember 2011



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jawab dan tuliskan pada Kertas Kerja yang telah tersedia untuk pertanyaan di bawah ini.

- 1) Jelaskan program-program yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa!
- 2) Berdasarkan artikel di atas, sebutkan empat isu utama dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Malinau! Jelaskan program strategisnya!

**KERTAS KERJA LATIHAN 2**

- 1) Program-program yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa: (isikan dalam tabel berikut!).

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
1.		
2.		

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
3.		
4.		

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
5.		

- 2) Empat isu utama dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Malinau:

Dari isu-isu berikut, berilah tanda \checkmark pada kolom YA/TIDAK untuk isu utama dalam kerangka pembangunan Kecamatan dan Desa yang benar di Kabupaten Malinau:

No.	Isu-isu Pembangunan	YA	TIDAK
1.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		
2.	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia		
3.	Pembangunan Infrastruktur		
4.	Pengembangan pariwisata		
5.	Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan		
6.	Penata layanan pemerintahan (reformasi birokrasi)		

Program strategis yang dijalankan berkaitan dengan isu-isu utama tersebut yaitu:

Pembangunan infrastruktur	Tujuan

Pengembangan kualitas SDM:

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Program-program yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa:

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<p>Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menugasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.</p> <p>Pengembangan ekonomi perdesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan.</p> <p>Pembangunan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.</p>	<p>a. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.</p> <p>b. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak</p> <p>c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.</p> <p>d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan</p>

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan dengan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pengembangan pendidikan b. Program peningkatan pelayanan kesehatan c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. e. Pembinaan kehidupan beragama f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
3. Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan perdesaan. b. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian c. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

Poin Utama	Penjelasan	Contoh Program
	aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.	
4. Pengembangan pariwisata	Pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya lokal sebagai pendukung obyek wisata daerah. Pengembangan pariwisata daerah juga diharapkan menjadi salah satu sektor unggulan di pedesaan yang memiliki sektor pariwisata yang banyak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan dan Peningkatan manfaat obyek wisata lokal b. Pengembangan obyek wisata baru c. Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya lokal. d. Pengembangan kesenian tradisional e. Pengembangan industri cendera mata
5. Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan	Pembangunan pedesaan yang baik tentunya harus yang berwawasan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budi daya. b. Pembangunan tambak dengan sistem <i>silfishery</i>, sistem tandon, dan empang parit.

2) Empat isu utama dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Malinau:

Dari isu-isu berikut, berilah tanda ✓ untuk isu utama dalam kerangka pembangunan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Malinau:

No.	Isu-isu Pembangunan	YA	TIDAK
1.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	✓	
2.	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	✓	

3.	Pembangunan Infrastruktur	✓	
4.	Pengembangan pariwisata		✓
5.	Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan		✓
6.	Penata layanan pemerintahan (reformasi birokrasi)	✓	

Program strategis yang dijalankan berkaitan dengan isu-isu utama tersebut yaitu:

Pembangunan infrastruktur	Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan jembatan 3. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan kecamatan 4. Pembangunan tata ruang pedesaan dan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah 2. Membuka isolasi daerah untuk memudahkan akses transportasi, komunikasi, dan informasi 3. Menata ruang pedesaan dan kecamatan agar lebih baik, rapi, indah, dan tertib

Pengembangan kualitas SDM:

Merevitalisasikan resolusi sumber daya pembangunan yang dimiliki, baik SDM maupun SDA yang tersedia cukup besar di bumi intimung ini. Salah satu langkah strategis yang efisien dan efektif untuk memfokuskan segala daya yang di miliki adalah peningkatan kualitas sektor kesehatan berupa perlengkapan, SDM, pelayanan dan manajemen RSUD Malinau.

Daftar Pustaka

- Agere, Sam. (2000). *Promoting Good Governance: Principles, Practices, and Perspective*. London: Commonwealth Secretariat.
- Asia Research Centre. (2001). *Decentralisation and Development Cooperation: Issues for Donors*. Murdoch University, (on line).
- Bahl, Roy; Martinez-Vazquez, Jorge. (2006). *Sequencing Fiscal Decentralization*. Washington, DC: World Bank.
- Boritt, Gabor S. (1994). *Lincoln and the Economics of the American Dream*. University of Illinois Press.
- Danoedjo, Soenarjono. (1993). *Mega Cities and Rural Areas: A Case Study of Metropolitan Jakarta*. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development.
- Hadi Kusumo Amijoyo. (2009). <http://hamijoyo.multiply.com>. Artikel: Proses Peradaban dan Kebudayaan Indonesia (*Part 1*). Diakses tanggal 30 Agustus 2012.
- Hoessein, Bhenjamin. (1993). Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu dan Administrasi. Disertasi. Jakarta: Pascasarjana UI.
- Kotter, J. P. (1996 and 2003). *Leading Change. Library of Congress Cataloging-Publication Data*. Boston: Harvard Business School Press.
- Mantysalo, Raine. (2005). Approaches to Participation in Urban Planning Theories. In Zetti, Iacopo & Brand. (2005) *Rehabilitation of Suburban Areas – Brossi and Le Piagge Neighborhoods*. Diploma Workshop. pp 23 – 38. Department of Technology of Architecture and Design, University of Florence.
- Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, vol. 50.
- Paton, R.A. & McCalman, J. (2000). *Change Management: A Guide To Effective Implementation*. USA: Sage.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Randy R. Wrihatnolo. Analisis Kebijakan Pembangunan Perdesaan.
<http://wrihatnolo.blogspot.com/2009/09/meninjau-ulang-kebijakan-pembangunan.html>.
- Sukraaliawan. Administrasi Keuangan Negara.
<http://sukraaliawanwordpres.wordpress.com/2011/11/02/administrasi-keuangan-negara>.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Whatmore, S. (2008). Living cities: towards a politics of conviviality. Republished in Anderson, K., and Braun, B. (eds.) *Environment: Critical Essays in Human Geography (Series: Contemporary Foundations of Space and Place)*. Ashgate.
- World Bank. (2005). *Social Capital, Empowerment, and Community Driven Development*.